



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RDPU PANJA PERGURUAN TINGGI KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)

Tahun Sidang	:	2022 – 2023.
Masa Sidang ke-	:	II
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP)
Dengan	:	1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah IV/Jabar 2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah IX/Sulsel 3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah XI/Kalimantan 4. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah XIII/Aceh 5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah XIV/Papua dan Papua Barat
Hari/Tanggal	:	5 Desember 2022
Pukul	:	13.00 – Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	:	Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	:	1. Kondisi dan Tantangan dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Khususnya PTS di Indonesia 2. Masukan dan Rekomendasi Penguatan Perguruan Tinggi PTS.
Hadir Komisi X DPR RI	:	14 orang dari 29 orang Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	:	1. Dr. Suriel S. Mofu. S.Pd.,M.Ed.,TEFL.,M.Phil (Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV/Papua, Papua Barat). 2. Dr. Ir. Rizal Munadi, M.M, M.T (Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIII/Aceh),

3. **Dr. Drs. Muhammad Akbar, M.Si** (Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI/Kalimantan)
4. **Andi Lukman** (Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX/Sulsel)
5. **Dr. M. Samsuri, S.Pd. M.T** (Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV/Jabar-Banten)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.20 WIB oleh **Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari **Dr. Suriel S. Mofu. S.Pd.,M.Ed.,TEFL.,M.Phil, Dr. Ir. Rizal Munadi, M.M, M.T Andi Lukman, Dr. Drs. Muhammad Akbar, M.Si Dr. M. Samsuri, S.Pd. M.T**, dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Perguruan Tinggi (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

1. **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV/Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan**
 - a. Untuk Papua bagi mahasiswa PTS lebih terjangkau daripada PTN.
 - b. Perlu penambahan kuota KIP bagi mahasiswa Papua dengan afirmasi bagi wilayah berbiaya tinggi.
 - c. Pentingnya *merger* PTS untuk penguatan PTS.
 - d. Terkait jabatan fungsional Dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV sudah baik, namun perlu pengangkatan Dosen dan Tenaga kependidikan yang diangkat sebagai PNS adalah Orang Asli Papua (OPA) dan atau lahir besar di Papua (LABEPA).
 - e. Permendikbudristek No.15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV sangat dirasakan bermanfaat daripada Lembaga Kopertis.
 - f. LLDIKTI XIV meminta dukungan kepada Komisi X DPR RI agar anggaran SBSN tahun 2023 pada DIPA LLDIKTI (Aplikasi Sakti) di buka Blokir karena ijin prinsip Presiden Belum di tandatangani untuk pembangunan Kantor LLDIKTI XIV sebesar Rp. 121.368.711.000 yang berlokasi di Indina Bo, Kampung Darfuar Distrik Samofa Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua seluas 20 ha.

2. **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIII/Aceh**
 - a. Permasalahan PTS kebanyakan karena adanya konflik antara Badan Penyelenggara dan Pengelola PTS dengan solusi *merger* mampu mengurai konflik.
 - b. Terkait MBKM bagi PTS memiliki kesulitan dalam konversi nilai.
 - c. Perlu klusterisasi pembagian hibah bagi PTS.

3. **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI/Kalimantan**
 - a. PTS di Kalimantan mengalami kendala dalam pemenuhan berbagai standard atau kualitas layanan kepada mahasiswa yang di pengaruhi diantaranya:
 - 1) Kurang mempunya Badan Penyelenggara menyediakan dana operasional perguruan tinggi, dana gaji, dan sarana pra sarana.
 - 2) Jumlah mahasiswa PTS menurun kalah bersaing dengan PTN, dan banyak dari kalangan sosial ekonomi menengah kebawah.
 - 3) Tidak mampu membayar biaya LAM untuk mutu akreditasi Program Studi, sehingga banyak Dosen pindah perguruan tinggi untuk melanjutkan karier yang pada akhirnya akan merugikan mahasiswa atau masyarakat.
 - 4) Keterbatasan tenaga Dosen kualifikasi S2 dan S3 sehingga perlu kesempatan melanjutkan studi berdasarkan waktu tempuh bukan jarak tempuh 60 KM.
 - 5) Layanan jaringan telekomunikasi yang berkualitas belum merata terutama di daerah 3T.
 - b. Untuk penguatan PTS diperlukan:
 - 1) bantuan pembiayaan untuk Badan Penyelenggara dan Pengelola PTS
 - 2) memberi peluang bisa menerima mahasiswa baru dengan menyempurnakan system penerimaan mahasiswa baru di PTN tidak terlalu lama,
 - 3) keringanan biaya akreditasi Program Studi (Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)), dukungan kebijakan dan biaya studi lanjut Dosen, dan
 - 4) penambahan kouta KIP untuk mahasiswa pedalaman Kalimantan.

4. **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX/Sultanbatara.**
 - a. MBKM perlu didorong karena sudah menjadi kebutuhan, untuk itu perlu dukungan pengembangan SDM, Kurikulum, dan Sarana dan Prasarana.
 - b. Tantangan PTS sebagian besar terkait disparitas antara PTS dan PTN.
 - c. Perlu evaluasi yang ketat bagi PTS yang tidak mampu menyelenggarakan perguruan tinggi agar yang tidak sehat dapat ditutup dan diberlakukan moratorium pendirian perguruan tinggi.

d. Perlu dibukanya moratorium Dosen PNS bagi PTS.

5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV/Jabar dan Banten.

- a. Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Unggul/A ada 7 PTS, sedangkan Akreditasi Unggul/A ada 174 Program Studi.
- b. Perlu payung hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk bantuan negara kepada LAM dalam memberikan dukungan pendanaan akreditasi program studi.
- c. Perlu akselerasi proses merger PTS agar berdaya saing dan menyediakan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Perlu peningkatan kualifikasi Dosen dan karir Dosen.
- e. Mendongkrak MBKM, Treacer Study, partisipasi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan berkualitas.

B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:

1. Perlunya penguatan pengelolaan Perguruan Tinggi dengan memperhatikan anggaran pendidikan, riset perguruan tinggi, pembinaan/akreditasi, tata kelola PTS yang bermutu dan lain-lain.
2. Perlu memaksimalkan anggaran fungsi pendidikan 20% dari APBN agar dioptimalkan untuk Kemendikbudristek RI dan perlu afirmasi kepada PTS karena telah menampung Dosen, Mahasiswa dan meningkatkan APK Perguruan Tinggi.
3. Mendukung LLDIKTI agar memiliki peran strategis termasuk dukungan anggaran agar bisa bekerja mencapai mutu perguruan tinggi yang baik.
4. Perlu evaluasi kriteria kompetisi dalam mendapatkan bantuan atau hibah kepada PTS untuk peningkatan mutu agar terjadi keadilan dalam memberikan bantuan kepada PTS.
5. Perlu evaluasi terkait keberadaan Universitas Terbuka dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berbasis daring menjadi luring.
6. Menghimbau para narasumber agar secara aktif memberikan masukan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan Kebijakan Perguruan Tinggi dan program turunannya dan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan Pendidikan di Indonesia.

C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

KETUA RAPAT,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Dede Yusuf'.

Dr. Dede Yusuf ME, ST. M.I.Pol 